

DARI KOLONIALISME HINGGA RUANG DISPLAY

Meninjau Museum Dari Kajian Poskolonial

ASYHADI MUFSI SADZALI

Program Studi Arkeologi
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia
Telepon: 0741-5917398, Faksimile. 0741-583111
Pos-el: asyhadi_mufsi@unja.ac.id

Abstrak

Perkembangan arkeologi di Indonesia dimulai pada awal abad ke-18 atas munculnya ketertarikan sekelompok masyarakat Eropa terhadap benda dan bangunan kuno yang ada di Indonesia. Dari kolonialisme kuno berubah jadi penjajahan ekonomi dan ideologi. Perubahan bentuk kapitalis kuno dengan kapitalis gaya baru yang intinya sama-sama menghisap dan selalu ada bangsa yang menjajah dan yang dijajah. Dari kolonialisme bahkan berlanjut hingga ke ruang display sebuah museum, di mana segala hal yang ditampilkan tidak terlepas dari aroma kolonialisme. Dimana politik adalah muatan utama yang disisipkan secara kasat mata. Bahkan bayang-bayang kolonialisme masih melekat dalam sistem birokrasi museum yang dengan sadar atau tidak hal itu terus berlangsung hingga kini. Seperti ada kecenderungan dan keyakinan dalam kerangka pikir masyarakat bekas jajahan, bahwa apa yang pernah ditawarkan dan dilakukan kolonial di masa lampau harus dipertahankan karena dianggap lebih baik dan moderen.

Kata Kunci: Kolonialisme, ruang display, museum, postkolonial

PENDAHULUAN

Perkembangan arkeologi di Indonesia dimulai pada awal abad ke-18 atas

munculnya ketertarikan sekelompok masyarakat Eropa terhadap benda dan bangunan kuno yang ada di Indonesia.

Rumphius disebut-sebut sebagai sejarawan pertama yang melakukan pendataan dan pencatatan benda-benda arkeologi yang kemudian dibukukan dengan judul *D'Amboinsche Rariteitkamer* "kamar yang berisi benda-benda unik dari Ambon" terbit pada tahun 1705. Selanjutnya pada tahun 1778, *Royal Society* (perkumpulan para petinggi kolonial) dibentuk atas dasar semangat mencerahkan bangsa jajahan (politik etis). *Royal Society* kemudian mendirikan Museum Batavia yang kini dikenal dengan sebutan Museum Nasional (Museum Gajah). Sejarah perkembangan museum di Indonesia sangat dipengaruhi dengan situasi politik dunia pada saat itu. Salah satunya adalah *Exposition universelle*, yang merupakan suatu pameran dunia yang dipelopori oleh bangsa-bangsa kolonial yang digelar pada tahun 1889 di Paris, Prancis. Penyelenggaraan kegiatan itu selain untuk menampilkan kejayaan masing-masing Negara peserta (Eropa) juga memperlihatkan bangsa jajahan yang dimiliki masing-masing Negara peserta. Seperti misalnya Belanda pada waktu itu menampilkan rumah tradisional Jawa lengkap dengan isi rumah dan orang yang hidup dan tinggal didalamnya. Dengan kata lain *Exposition universelle* merupakan pagelaran untuk menampilkan eksotisme Timur yang pada kenyataannya lebih dekat pada sesuatu yang dianggap aneh, primitif dan bodoh. Pada tahun-tahun berikutnya juga

banyak kegiatan serupa yang juga mempertontonkan bangsa jajahan masing-masing, mulai dari Afrika hingga ke Asia. Egois menegara-negara penjajah dan saling bersaing untuk menempati peringkat terhebat dan teratas merupakan landasan nyata digelarnya *Exposition universelle* yang kemudian dimasa sekarang lebih dikenal dengan sebutan *World Expo*.

Sanghai menjadi tuan rumah perhelatan *World Expo* pada tahun 2010. Amerika, dan Negara-negara Eropa maupun Jepang pernah menjadi tuan rumah kegiatan tersebut, yang kemudian muncul indikasi bahwa tuan rumah adalah bangsa-bangsa penjajah. Seperti sebuah tulisan yang saya kutip "jika kolonialisme dapat dilihat sebagai pembentukan budaya, maka demikian juga kebudayaan merupakan pembentukan kolonial" (Dirks, 1992. Hlm. 39). Kalimat singkat tersebut memberikan penjelasan yang panjang kepada kita bahwa masyarakat kolonial serta merta dengan sengaja dan berusaha untuk menciptakan kesadaran palsu dalam masyarakat jajahannya. Salah satu bentuknya telah mereka tampilkan dalam bentuk museum hidup yang dipamerkan pada *Exposition universelle* atau *world expo* dimasa kini. Ada dua kekuatan dan *show up* antar masing-masing Negara kuat yang mempunyai tujuan yang sama dengan *exposition universelle* masa kolonial yakni

sebuah bentuk pernyataan tidak langsung bahwa kami yang terhebat, kami adalah tuan dan kalian adalah budak.

Dari kolonialisme kuno berubah jadi penjajahan ekonomi dan ideologi. Perubahan bentuk kapitalis kuno dengan kapitalis gaya baru yang intinya sama-sama menghisap dan selalu ada bangsa yang menjajah dan yang dijajah. Dari kolonialisme bahkan berlanjut hingga ke ruang display sebuah museum, di mana segala hal yang ditampilkan tidak terlepas dari aroma kolonialisme. Dimana politik adalah muatan utama yang disisipkan secara kasat mata. Bahkan bayang-bayang kolonialisme masih melekat dalam sistem birokrasi museum yang dengan sadar atau tidak hal itu terus berlangsung hingga kini. Seperti ada kecenderungan dan keyakinan dalam kerangka pikir masyarakat bekas jajahan, bahwa apa yang pernah ditawarkan dan dilakukan kolonial di masa lampau harus dipertahankan karena dianggap lebih baik dan moderen. Apakah mental-mental budak, dan mental bangsa terjajah itu belum hilang dari bangsa ini? Seperti ada rasa kurang percaya diri dan luka masa lalu yang masih melekat hingga mengkarat dalam karakter dan pola pikir masyarakat bekas jajahan. Ternyata terdapat pengaruh psikologis yang kuat atas masa lalu yang masih terasa hingga dimasa kini, “dan pada hari penindasan berhenti,

manusia baru diduga akan muncul dihadapan mata kita secara langsung. Saat ini, saya tidak suka mengatakan begitu, akan tetapi saya harus mengatakannya, karena dekolonisasi telah menunjukkannya: ini bukanlah persoalan cara terjadinya, kehidupan yang terjajah untuk waktu yang lama sebelum kita melihat bahwa benar-benar ada manusia baru” (Memmi, 1968. Diikutip dari Gandhi, 1998. Hlm. 8). Memmi dalam ungkapanya terlihat pesimis akan adanya masyarakat baru yang benar-benar telah merdeka secara pamikiran dan memiliki mentalitas mandiri dan bermartabat. Apakah luka dan pengaruh kolonialisme begitu dalam dan mendarah daging? Pertanyaan tersebut akan saya jawab dari sudut pandang museum dalam kajian poskolonial.

TEORI POSKOLONIAL

Foucault dalam bukunya *The Archeology of Knowledge* banyak memaparkan wacana yang sudut pandang di pengaruhi oleh pemikiran Karl Marx, khususnya dalam dialektika materialnya. Pengaruhnya kemudian banyak menginspirasi para akademisi yang salah satunya adalah Edward W Said dengan salah satu bukunya yang sangat populer, *Orientalism*. “Orientalisme secara umum dianggap sebagai katalisator dan titik referensi bagi poskolonialisme, mewakili tahap pertama teori poskolonial” (Gandhi,

1998. Hlm. 85-86). Said mempublikasikan bukunya pada tahun 1978 dan dalam peluncurannya banyak mendapat sambutan dari dunia internasional khususnya Asia-Afrika sebagai bangsa bekas koloni. Said dalam *orientalism* mengkaji orientalisme dengan tujuan untuk melihat hubungan sejarah yang tidak seimbang antara dunia Timur dengan dunia Barat (imperialis Eropa). Kajiannya banyak menggunakan pendekatan *cultur studies*, membahas tentang berbagai konteks budaya lokal yang menjadi korban langsung kolonialisme. Said membawa pengaruh yang luar biasa bagi analisis kolonialisme dan pemikiran kolonial. Orientalisme dianggap sebagai tahap pertama teori poskolonial.

Studi poskolonial menempatkan dirinya sebagai suatu kajian yang tidak ingin terlepas dari segala bentuk konteks historis yang menaungi bangsa-bangsa yang merasakan dampak-dampak penjajahan. Dampak-dampak tersebut tidak bisa di bilang "usai sudah" atau telah berakhir sejak bangsa ini memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Leela Gandhi dalam bukunya "Teori Poskolonial: Dalam Meruntuhkan Hegemoni Barat" berpendapat bahwa bangsa-bangsa bekas koloni cenderung berusaha lepas dari luka lama dengan cara amnesia sejarah, dengan kata lain secara sengaja menghapus sejarah kelam masa penjajahan dari kerangka pikir bangsa-bangsa terjajah. Hal ini

mempengaruhi pola pikir dan mentalitas sehingga semakin tidak percaya diri dan tidak mempunyai pegangan sejarah yang kuat dan mudah diombang-ambingkan oleh ketergantungan pada sistem-sistem kolonial.

Paparan di atas mengisaratkan bahwa teori poskolonial terlahir untuk menggugat praktek-praktek kolonialisme yang telah melahirkan kehidupan yang penuh dengan rasisme, hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, budaya subaltern (orang-orang yang tertindas), bukan dengan propaganda perang atau kekerasan fisik namun dengan dialektika kesadaran dan pemaksaan gagasan (pola pikir dan mentalitas). Poskolonial mencoba membongkar mitos-mitos yang "mengkerdikan" mental masyarakat bangsa terjajah dan yang telah menghapus jati diri bangsa. Secara historis kajian poskolonial adalah kajian akademis yang berkembang pada era tahun 1980-an dan dari kajian-kajian ini kemudian muncullah gambaran-gambaran yang tidak menyenangkan dari bangsa-bangsa penjajah ataupun pembentukan (pencitraan) gambaran yang tidak sesuai dari bangsa terjajah (bangsa koloni) sebagai suatu kelompok masyarakat yang selalu dianggap barbar, tidak beradab, bodoh dan aneh. Bagi kebanyakan orang, kolonialisme hanyalah persoalan masa lalu, dan kini dunia sudah berubah menjadi tempat yang berbeda. Tempat yang jauh lebih simpatik terhadap

masyarakat pribumi. Apakah benar seperti itu? Kajian poskolonial dalam teori maupun pemahaman dan pemaparannya teramat luas untuk benar-benar dipaparkan dengan lengkap dan mendalam pada kajian ini. Dan teori poskolonial yang saya gunakan dalam pembahasan ini hanyalah sebagai alat untuk membedah persoalan-persoalan yang akan saya angkat, dan teori poskolonial sebagai pisau bedah yang cocok untuk melihat museum dari sisi lain.

MUSEUM SONOBUDOYO DALAM KAJIAN POSKOLONIAL

Museum Sonobudoyo merupakan museum terlengkap setelah Museum Nasional di Jakarta yang terkait dengan seni budaya dan kepurbakalaan. Museum ini merupakan museum pertama dan tertua di D.I.Y yang resmi didirikan pada 6 November 1935. Keputusan mendirikan museum Sonobudoyo merupakan hasil dari kongres *Java Institut* yang diselenggarakan di Surakarta pada tahun 1931. Perlu diketahui bahwa *Java Institut* sendiri merupakan sebuah lembaga yang berkecimpung dalam dunia kebudayaan yang beranggotakan mayoritas orang-orang asing. Pada awal pendiriannya, Ir. Th Karsten sebagai perancang bangunannya mendesain bangunan Sonobudoyo sesuai dengan koleksi yang akan ditampilkan, yakni koleksi Jawa, Madura, Bali dan sebagian pulau Lombok.

Adapun sejarah perkembangan Museum Sonobudoyo setelah kolonial Belanda jatuh maka dikelola dibawah pemerintahan Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia kemudian ditangani oleh Dinas Wiyoto Projo yang berlangsung dari tahun 1945-1949 lalu kemudian berpindah tangan ke Dinas P dan K Provinsi D.I.Y. Pada 11 Desember 1973 berganti tangan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan dimasa kini menjadi Museum Provinsi yang berada dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kolonialisme secara sengaja dibentuk untuk mengubah budaya-budaya tradisonal melalui idiologi dan politik kolonial yakni penaklukan dan pemerintahan. Sistim kolonial serta merta memberikan perubahan yang signifikan terhadap sistim birokrasi dan tatanan pemerintahan. Dalam hal ini ternyata pengaruhnya juga meliputi sistim birokrasi di dalam museum. Contoh kasus yang akan saya angkat adalah srtuktur hirarki birokrasi di museum Sonobudoyo. Secara struktur kepala museum berada pada bagan bagian paling atas yang kemudian pemegang kekuasaan dibawahnya adalah kepala tata usaha. Pimpinan bidang koleksi (kepala pengampu) berada pada posisi ketiga, dan kemudian membawahi beberapa pengampu koleksi (mirip kurator), dan begitu seterusnya hingga level paling bawah. Apabila kepala museum

berhalangan dalam tugasnya, maka kekuasaan dan segala keputusan berada pada tangan bagian tata usaha. Hal ini bila ditinjau lebih dalam dan jauh kebelakang merupakan produk tinggalan kolonial yang ternyata masih belum hilang dalam sistim birokrasi di Indonesia, khususnya didalam museum. Pada masa kolonial, masyarakat perkebunan seperti misalnya di Deli Serdang (Sumatera Utara) berada dibawah seorang *administratur*, atau semacam kepala tata usaha.

Sistim ini mengakibatkan adanya kewenangan berlebih dari seorang tata usaha yang tidak paham dan mengerti dengan permuseuman juga dengan koleksi, baik dalam mengatur dan menentukan koleksi masuk, koleksi keluar ataupun dalam hal pembelian koleksi baru. Bisa dibayangkan apa yang terjadi dengan museum dengan hal tersebut. Secara sistim, semua hal harus berawal dari bagian tata usaha dan dengan sepengetahuannya juga. Kekuasaan yang terlalu besar ini mengakibatkan kekacauan dalam museum. Ada adu kekuatan dalam satu badan yang kemudian membentuk blok dan kelompok. Dalam kasus hilangnya 75 koleksi emas museum Sonobudoyo membawa saya ikut serta dalam tim evaluasi museum sebagai asisten dari Bapak KRT Thomas dan Daud Tanudirjo. Dalam proses evaluasi yang hampir berlangsung selama satu bulan, saya dapat melihat bagaimana sistim administrasi

berjalan dengan kurang maksimal dan kurang sesuai dengan *Tupoksi-nya*. Sebut saja salah satu contohnya dalam hal pembelian koleksi baru yakni satu set wayang baru Cirebon. Dalam hal ini yang menentukan pembelian adalah bagian tata usaha, sementara bagian pengampu koleksi wayang sendiri (mirip kurator) tidak tahu dan tidak punya wewenang untuk bersuara dan mengemukakan pendapat.

Satu lagi hal aneh yang sering terjadi di museum yakni seringnya terjadi sistim *roling* (pertukaran) pegawai. Berdasarkan Kode etik ICOM untuk museum, museum adalah suatu lembaga yang membutuhkan profesionalisme dan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya, bidang-bidang khusus yang membutuhkan *knowledge* dan pengalaman tingkat tinggi (ICOM, 2007.Hlm. 10-11), tapi aneh justru ada kegemaran dalam museum dengan sistim *roling*(pertukaran) pegawai yang sepenuhnya diatur oleh bagian tata usaha. Dalam struktur birokrasi dan wewenang, apabila kita merujuk pada kode etik ICOM (International Council of Museum) dalam sub-bab personil tertera pada poin 1.11 sampai dengan 1.14, jelas disebutkan bahwa Direktur museum bertanggung jawab langsung pada pengampu koleksi. Dan pengampu koleksi dalam hal kinerjanya memiliki independensi dan hubungan profesionalisme secara langsung

dengan Direktur museum, dengan kata lain Direktur museum tidak bisa menyalahgunakan kekuasaannya karena ada prosedur hukum yang mengatur dan demikian juga sebaliknya (ICOM, 2007. Hlm, 2).

Akan tetapi pada kenyataannya dilapangan banyak hal-hal yang menyimpang. Sistim kolonial yang pernah berlangsung begitu lama di negara ini ternyata dalam era modern dan pada generasi yang barusistim itu masih terus berlangsung dan berjalan dalam sebuah birokarasi. Mungkin ada pemanfaatan atau mungkin juga ada kecendrungan untuk mengacu pada sistim lama atau seperti meniru, yang dalam bahasanya Homi K Bhaba dia menyebutnya dengan istilah *mimikri* (meniru). Seperti yang dijelaskan dalam tulisan Nicholas B. Dirks “dengan memandang kolonialisme sebagai proyek budaya pengontrol maka menjadi terpusat dan ketergantungan anatar kolonialisme dan kebudayaan” (Dirks, 1992. Hlm. 40) Dengan asumsi lain, kita telah dibentuk oleh pemerintah kolonial, termasuk dalam sistim permuseuman. Seperti yang disebutkan Edward Said “orientalisme” sebagai sesuatu yang berada di Timur yang lebih rendah dan dikontrol oleh Barat, dimana terdapat gagasan di dalamnya bahwa identitas eropa sebagai identitas yang lebih unggul. (Said, 1994. Hlm. 9). Seperti itu lah para

kolonialis memandang bangsa ini, sehingga ada anggapan Barat berarti Modern. Dalam proses tersebut hal itu membantu menggeneralisasi konsep tentang Barat dari sebuah entitas goeografis dan temporal ke sebuah kategori psikologis. Dua hal yang berbeda tapi disamakan seolah-olah sama dengan tujuan politis, dan ternyata bangsa jajahan setuju dengan hal tersebut dan menelannya bulat-bulat. Persoalan diatas hanya sebageian kecil dari pengaruh kolonialisme yang ternyata masih ada dan perlu di perbaharui ke arah yang lebih baik.

Guru yang baik akan mengajarkan hal yang baik. Pelajaran yang sesat akan melahirkan murid-murid yang sesat. Mungkin ada yang salah dalam pembinaan dan pedoman permuseuman di Indonesia. Itu salah satu yang menjadi kecurigaan saya. Dalam hal ini yang menjadi guru permuseuman di Indonesia adalah Direktorat Permuseuman, hal ini saya simpulkan bukan tanpa alasan. Dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0222e/0/1980, Bab V, Pasal 81 dan 82 yakni berupa: merumuskan kebijakan teknis di bidang permuseuman, melaksanakan kegiatan dan pembinaan permuseuman, dan melaksanakan urusan tata usaha Direktorat. Dari penjelasan singkat tersebut kita sudah dapat menilai dan menyimpulkan bahwa

tegangan arus rendah yang kini terjadi dalam dunia permuseuman, sumber enrgi-nya berasal dari Direktorat Permuseuman. Dalam Bunga Rampai (masih jadi tanda tanya dalam benak saya, kenapa bunga rampai?) Permuseuman yang dikeluarkan oleh Direktorat Permuseuman terdapat beberapa hal yang janggal dan kurang tepat, antara lain: terdapat satu sub-bab yang menggunakan bahasa Inggris dengan judul sub-bab “*FUTURE ORIENTED CULTURAL POLICIES AND MUSEUM DEVELOPMENT PROGRAMS*” Sedikit banyaknya ini menunjukkan betapa orientasi dan arah kiblat bangsa ini masih menganggap Eropa itu segalanya. Terbukti tidak ada rasa percaya diri dan mental bangsa terjajah masih melekat kuat di dalamnya. Dalam buku tersebut, juga dijelaskan pemahaman tentang museum “museum adalah pengawal warisan budaya” (Bunga Rampai Permuseuman, 1997. Hlm, 15). Museum hanya jadi pengawal, dan bukan hal yang mengherankan jika benda yang berada dalam museum adalah sesuatu yang bisu dan kaku. Apabila museum itu dipahami sebagai seorang guru sekaligus teman yang mengasikkan, mungkin akan banyak hal yang bisa kita peroleh dari museum dan tentunya museum itu akan sangat mengasikkan. *Museum is a story teller*, sumber kisah itu adalah koleksi dan orang-orang yang berkecimpung di dalamnya haruslah jadi pencerita yang baik. Dan itu belum saya

temukan dalam beberapa museum Pemerintah di Indonesia, termasuk Sonobudoyo yang pada hakeketnya punya koleksi yang sangat luar biasa.

DARI KOLONIALISME HINGGA RUANG DISPLAY

Jika penelitian-penelitian tentang hukum, tenaga kerja dan pertanian di panggung-panggung kolonial menyingkapkan arti penting untuk pembentukan tatanan-tatanan baru, maka pameran-pameran kolonial yang dilakukan pada *Exposition universelle*, *Colonial exhibition* dan pameran dalam bentuk lain memberikan gambaran bahwa barat mempertontonkan Timur, lebih kepada anggapan kolonial sebagai kenyataan sebenarnya yang perlu diberi pencerahan dan menunjukkan siapa “Tuan dan budak”. Atas dasar apa Barat dikatakan lebih berbudaya dibandingkan Timur, atau lebih beradab dibandingkan Timur? Dalam catatan-catatan penjelajah Eropa seperti Tome Pires, Rodrigues, Jhon Davis dan lain sebagainya jelas-jelas menyebutkan keheranannya atas hal-hal luar biasa yang mereka saksikan. Seperti misalnya kebiasaan mandi orang Timur dan hal-hal beradab lainnya.

Orientalisme seperti yang sering disebutkan Said, oleh agen-agen kulit putih kerap melakukan *mistifikasi* (penciptaan kesadaran palsu) baik dalam tatanan

pemikiran, asrip atau catatan-catatan kolonial maupun sistem yang sengaja dibuat baku untuk tujuan tertentu. Museum adalah salah satu produk dari kolonialisme, yang dibentuk dan dibuat sesuai pemikiran kolonial dan cara pandangnya. Tentu dalam penciptaannya ada faktor dan maksud tertentu, terlebih dalam hal penyajiannya atau display. Bila kita melihat jauh kebelakang dimana konsep awal dari museum adalah dianggap seperti candi atau kuil-kuil yunani yang suci dan hanya untuk kalangan tertentu, maka tidak heran pada masa-masa awal munculnya museum hanya kaum bangsawan yang bisa mengunjungi museum. Dari bangsawan oleh bangsawan untuk bangsawan. Seperti yang terjadi di zaman Romawi dimana kaisar Roma memerkan benda-benda dari negeri jajahan sebagai simbol kekuasaan dan legitimasi kekuatan. Museum di zaman kolonial hadir sebagai bentuk politik dan pernyataan kepada kaum terjajah bahwa hanya Barat yang memiliki ilmu pengetahuan dan Timur patut dipertontonkan atas ketertinggalan dan budaya primitifnya. Budaya material bangsa terjajah di pameran sebagai simbol penaklukan dan kontrol Eropa atas segala hal dalam negeri jajahan. Dan anehnya, bangsa Eropa mengagap tindakan mereka itu adalah tindakan agung yang mulia, “dalam pandangannya, orientalis modern adalah seorang pahlawan yang tengah menyelamatkan

Timur dari kesuraman, aljenasi dan keterasingan yang telah secara layak dijadikan sebagai cirinya” (Said, 1994. Hlm. 160).

Museum Sonobudoyo memiliki 43.583 koleksi (termasuk 75 unit item yang hilang) baik yang dipamerkan maupun yang disimpan di storage. Ruang pameran dibagi dalam beberapa bagian yang disusun berdasarkan *story line* (alur pengunjung) yang ditetapkan secara sepihak oleh pihak museum dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Koleksi ditampilkan dalam bentuk menempatkannya pada lemari kaca atau *filtrin* dan pada bagian bawah koleksi diberi label informasi singkat tentang koleksi yang dipamerkan. Bentuk lain adalah berupa diorama dan manakin (boneka tiruan) yang diberi baju dengan wajah dan warna kulit yang semuanya hampir sama lalu diberi label informasi singkat. Koleksi yang berukuran besar seperti alat-alat musik tradisional dan artefaktual batu dipamerkan dengan meletakkannya, pada alas tertentu atau terkadang tanpa alas dan dengan tambahan label informasi singkat.

Apabila kita kembali kemasa kolonial, maka koleksi di museum geologi, Batavia museum (museum nasional sekarang) maupun Sonobudoyo di tahun 1935, maka kita akan melihat hal yang sama, dimana koleksi dipamerkan begitu saja dan yang berbeda hanyalah label infomasipada koleksi. Karena

pada waktu itu cara memberikan informasi mengenai koleksi seluruhnya digabungkan dalam sebuah buku pegangan yang akan anda bawa kemana-mana selama berkeliling mengunjungi museum. Koleksi dipamerkan hanya sebagai barang tontonan karena eksotismenya (anggapan kolonial) seperti yang disebutkan Rumpius dalam bukunya *D' Amboinsche Rariteitkamer* "kamar yang berisi benda-benda unik dari Ambon", jelas hal itu merujuk pada maksud orientalisme atau sesuatu hal yang aneh, primitif, eksotis, bodoh dan rongsokan masa lalu. Museum juga dibentuk sebagai tempat untuk melihat betapa Barat begitu agung dan beradab sedangkan Timur adalah sesuatu yang konyol dan pantas untuk dijajah dan diberikan pencerahan. Bagi mereka museum itu tidak lebih sebagai tempat untuk membanggakan diri, mengagungkan rasnya, dan sebagai ajang politik untuk kepentingan tertentu. Hal ini bukan tidak berlandaskan dan beralasan, tapi kenyatannya bisa kita lihat dari sejarah pemebentukan dan perkembangan museum "berawal dari konsep candi" yang suci dan untuk kalangan tertentu.

NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, tercipta oleh akibat kolonialisme, tanpa itu kita mungkin berdiri sebagai Negara-negara yang berbeda. Keaneka ragaman budaya yang begitu mejemuk tidak luput dari praktek kolonialisme dalam

museum, "jelas sekali, organisasi masa lalu yang terdekat dibawah rubrik kolonialisme cenderung mengurangi ke anekaragaman" (Gandhi. 2006. Hlm. 221). Museum bukan lah sebuah lembaga yang netral. Selalu ada keberpihakan terhadap suatu pandangan yang subjektif, namun hal ini bukan berarti harus mengingkari kebenaran dan menutupi kenyataan. Keberadaan suku yang lainnya juga harus ditampilkan. Dalam sebuah jurnal berjudul "community base museum: traditional curation in women's weaving culture" disebutkan bagaimana Museum Kapuas Raya – Sintang Kalimantan Barat menyajikan display dari berbagai etnik masyarakatnya yang beragam dengan arif dan bijaksana. Antar etnis ada proporsi yang sama, dan ditampilkan sesuai dengan cara pandang masyarakat tersebut terhadap budaya mereka. Demikian juga halnya dengan kolonial dalam memamerkan eksotisme Timur dalam sebuah museum. Patut dipertanyakan sudut pandang dan cara mereka melihat dan menjiwai koleksi tersebut dalam penyajiannya di ruang display.

Homi K Bhaba salah seorang akademisi yang banyak membicarakan poskolonial berkebangsaan India yang mencetuskan istilah *mimikri*. Mimikri itu sendiri berarti meniru. Dalam kajian poskolonial banyak juga yang menggunakan kajian sastra, dalam hal ini berupa novel yang bercerita tentang

pengalaman-pengalaman bangsa bekas koloni. Terlihat ada kecenderungan mimikri pada bangsa bekas jajahan. Dimana mereka banyak meniru dan mengikuti pandangan dan pola-pola kolonial. Misalnya parapelajar pribumi yang bersekolah di Belanda suka meniru beberapa lagu Belanda dengan mengganti liriknya dalam bentuk bahasa Jawa atau Melayu. Dalam dunia permuseuman hal ini ternyata juga terjadi. Ada kecenderungan meniru dan melanjutkan cara-cara pengelolaan museum seperti yang pernah dilakukan bangsa kolonial. Ada dua kemungkinan untuk hal tersebut, kurang percaya pada kemampuan sendiri atau pola pikir yang masih menganggap kolonial itu selalu lebih pintar, modern dan ahli dalam bidang tersebut. Hasilnya dapat kita saksikan sendiri pada museum-museum yang ada disekitar kita, seperti misalnya Sonobudoyo dan lain sebagainya.

Melihat museum Sonobudoyo dari sudut pandang poskolonial memberikan pemahaman bahwa sistim dan birokrasi di museum masih terjebak dalam bayang-bayang kolonialisme. Aturan dan cara pandangnya masih berada dibawah temeram lentera merah putih biru. Tidak mengherankan jikalau nafas dan aroma kolonialisme begitu kental di museum-museum sehingga bangsa pribumi yang pada dasarnya alergi kolonialis enggan

untuk berkunjung serta tidak bisa menikmati dan mengambil pelajaran dari apa yang ditawarkan dalam museum. Sungguh ironis dan menyedihkan bila pengunjung tidak bisa mengambil pelajaran dari museum yang sejatinya adalah media edukasi dan jendela budaya peradaban bangsa. Museum spekolialisme, karena isinya hanyalah penindasan, pembodohan dan politik yang membosankan. Lalu muncul pertanyaan, kenapa museum di Barat begitu edukatif, inovatif dan kreatif? Sebab tidak ada ketimpangan di dalamnya, tidak ada penjajah dan yang terjajah, dan itu dibentuk dan diciptakan untuk sesama mereka dalam kaca mata dan sudut pandang yang sama. Dan dengan tujuan museum yang sebenarnya, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Muncul pertanyaan kedua dalam benak saya, apakah sebenarnya tujuan museum di Indonesia di masa kini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Atau hanya untuk kepentingan politik saja?

KESIMPULAN

Dalam kesimpulannya, praktek-praktek kolonial dibangsa ini masih belum tuntas diberantas oleh Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pendekatan poskolonial yang bertitik berat pada kajian historikal material cukup membuka tirai praktek-praktek terselubung kolonialisme di

dalam museum, yang baik secara sadar atau pun tidak hal itu perlahan berubah jadi sebuah kebiasaan. Mengutip istilah Homi K Bhaba, *mimikri* atau kecenderungan untuk meniru sangat kental dalam museum-museum di Indonesia. Seolah-olah ada hokum dan aturan baku yang kaku yang mewajibkan semua museum itu harus sama, padahal museum yang ideal adalah museum yang memiliki cirri khas tersendiri dan konsep yang original sesuai dengan visi dan misi museum yang bersangkutan. “Dapat dikatakan bahwa poskolonialisme dikaitkan antara totalitas dan struktur politik di satu sisi, dan fragmen politik di lain sisi” (Gandhi. 2006. Hlm. 215). Museum yang pada dasarnya adalah lembaga edukasi masyarakat ternyata juga tidak terlepas dari politik. Sektiadi dalam sebuah jurnal berjudul “*Politics in the Museum: the Appearances of the Museum Sonobudoyo and the Museum Yogya Kembali, Yogyakarta*” mengulas dari sudut pandang politik simbolik dimana museum dijadikan sebuah wahana politik penguasa. Arkeologi sebagai sebuah disiplin ilmu tidak bisa terlepas dari politik maupun dari politisi yang mempolitikinya. Hal ini jelas disebutkan dalam sebuah buku yang ditulis Randall H. McGuire berjudul “*Archeology as Political Action*” arkeologi memang tidak bisa terlepas dari modernisasi dan perkembangan budaya global, dimana kapitalis memegang peranan dominan.

Museum sebagai objek tunggal dalam tulisan ini masih menyimpan warisan kolonial di dalamnya, baik secara birokrasi, konsep, dan tata pameran koleksi. Sonobudoyo saya jadikan objek kasus dikarenakan keterlibatan dalam evaluasi museum Sonobudoyo. Data dan informasi yang saya peroleh cukup mampu membukakan mata dan melihat dari luar maupun dari dalam sistem yang berjalan di museum Sonobudoyo. Evaluasi bukan untuk menghujat dan menghakimi, tapi untuk memperbaiki untuk menjadi lebih baik lagi. Dalam hal ini rekomendasi yang saya tawarkan adalah perubahan sistem birokrasi dari museum Provinsi ke museum BLA (Badan Layanan Umum) dimana museum langsung bertanggung jawab kepada Gubernur yang kedua, perlu diadakan seminar dan workshop permasalahan museum se-Indonesia yang mungkin bisa diadakan setahun sekali. Yang terakhir adalah, perlu adanya sebuah jurnal ilmiah permuseuman yang terbit sebulan atau dua bulan sekali, karena dengan demikian kita akan dapat melihat bagaimana dinamika perkembangan dunia permuseuman di Indonesia baik swasta maupun pemerintah. Akhir kata, untuk memberantas warisan kolonialisme yang melat pada museum di Indonesia butuh kerja keras dan keterlibatan dari segala pihak. Perlu adanya pembaharuan sistem dan tatacara juga cara pandang museum itu sendiri. Butuh waktu dan proses untuk menuju museum ideal

bangsa Indonesia yang sesuai dan mendidik bangsanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhaba, K. Homi. 2004. *The Location of Culture*. Routledge Classics. New York.
- Dirks. B. Nicholas. 1992. *Introduction: Colonialism and Culture*. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
- Direktorat Permuseuman. 1997. *Bunga Rampai Permuseuman*. Jakarta.
- Gandhi, Leela. 2006. *Teori Poskolonial. Upaya Untuk Merentuhkan Hegemoni Barat*. Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- ICOM. 2007. *ICOM Code of Ethics for Museum*. Terjemahan. ICOM Indonesia. Jakarta.
- McGuire H. Randall. 2008. *Arcaheology As Political Action*. University of California Press.
- Said. W Edward. 1994. *Orientalism*. New York: Random House, Inc.
- Sagita, Novia. 2007. *Community based museum: Traditional Curation in Women's Weaving Culture*. Amsterdam: KIT Publisher.
- Tanudirjo, A. Daud. 1995. *Theoretical Trends In Indoneisan Archaeology. Theory In Archaeology A World Perspective*. Routladge. New York.